

Dinamika Inflasi, Kemiskinan, Dan Kependudukan Dalam Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Di Kalimantan Tengah

Dicky Perwira Ompusunggu¹, Suherman², Jamillullah³, Augusta Rowa⁴, Renanda Indah Doharma Silalahi⁵, Rebecca Rosalia Nainggolan⁶, Friady⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Corresponding Author: Augusta Rowa E-Mail: agustarowa426@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk terhadap realisasi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, inflasi, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi pajak daerah dengan nilai F-hitung sebesar 4,347 dan signifikansi $< 0,05$. Secara parsial, variabel tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap realisasi pajak daerah, sedangkan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,938 mengindikasikan bahwa 93,8% variasi realisasi pajak daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan realisasi pajak daerah tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan, serta menekankan pentingnya strategi fiskal yang mempertimbangkan aspek demografi dan kesejahteraan sosial secara terpadu.

Kata kunci: Reg Regional Tax, Inflation, Poverty Rate, Population.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of inflation, poverty rate, and population on regional tax revenue realization in Central Kalimantan Province during the 2015–2024 period. A quantitative approach was employed using multiple linear regression analysis. The data used were secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The results indicate that inflation, poverty rate, and population simultaneously have a significant effect on regional tax realization, with an F-value of 4.347 and significance level < 0.05 . Partially, the poverty rate and population have a significant positive effect, while inflation has no significant effect. The coefficient of determination (R^2) is 0.938, which means that 93.8% of the variation in regional tax realization is explained by the model. These findings suggest that an increase in regional tax revenue does not necessarily lead to a reduction in poverty, emphasizing the importance of integrated fiscal strategies that consider demographic and social welfare aspects.

Keywords: Regional Tax, Inflation, Poverty Rate, Population.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah daerah adalah kemampuannya dalam menggali potensi sumber penerimaan asli daerah, khususnya melalui pajak daerah. Pajak daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Simbolon & Herijawati, 2023). Oleh karena

itu, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, pemahaman terhadap unsur-unsur yang memengaruhi realisasi pajak daerah menjadi sangat penting.

Realisasi penerimaan pajak daerah di Kalimantan Tengah bervariasi karena kondisi demografi dan ekonomi makro yang berbeda-beda. Inflasi, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk merupakan tiga variabel kunci yang sering dikaitkan dengan variasi tersebut. Hubungan antara kinerja pajak dan ketiga indikator ini sangat kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daya beli masyarakat menurun dan kemampuan membayar pajak menurun akibat inflasi yang menjadi tolok ukur stabilitas harga barang dan jasa (Azizah, Jamaludin, & Nariyah, 2024). Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang akhirnya memengaruhi kinerja sektor-sektor produktif penyumbang pajak.

Tingkat kemiskinan juga berperan penting dalam mempengaruhi realisasi pajak. Peningkatan kemiskinan biasanya menurunkan kemampuan kontribusi fiskal masyarakat dan memperbesar beban subsidi pemerintah daerah (Pasaribu et al., 2023). Karena aktivitas ekonomi lebih sedikit dan basis pajak lebih kecil di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, pendapatan pajak biasanya lebih rendah di daerah tersebut.

Bersamaan dengan itu, ukuran populasi menggambarkan basis pajak yang mungkin. Setiap pajak yang mungkin, baik itu pajak pribadi, pajak konsumsi, atau pajak atas bisnis, tumbuh secara proporsional dengan populasi (Shafira, 2024). Namun, dampak positif jumlah penduduk terhadap pajak baru dapat tercapai jika diimbangi dengan pemerataan ekonomi, pendataan wajib pajak yang akurat, dan implementasi kebijakan fiskal yang efektif.

Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel-variabel tersebut terhadap penerimaan pajak daerah. Misalnya, Pratiwi (2021) menemukan bahwa jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Jawa Timur. Sementara Bululung, Prang, & Mongi (2021) menegaskan bahwa pengelolaan fiskal daerah perlu mempertimbangkan dinamika kemiskinan dan inflasi untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan inflasi terhadap realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Tengah tahun 2015-2024. Dengan menggunakan analisis regresi linier multivariat dan metode kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kebijakan fiskal daerah yang lebih responsif dan berbasis data.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pajak daerah membantu membiayai sebagian biaya yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai ukuran otonomi fiskal, perpajakan daerah menunjukkan seberapa baik berbagai tingkatan pemerintahan dapat

memanfaatkan perekonomian masing-masing untuk mendanai layanan publik dan pembangunan (Widjaja, 2007).

Pajak daerah mencakup pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Inisiatif pembangunan daerah yang menjadi prioritas dibiayai melalui pajak ini. Beberapa faktor ekonomi makro memengaruhi penerimaan pajak daerah, antara lain pertumbuhan penduduk, inflasi, dan tingkat kemiskinan (Haniz & Sasana, 2013). Salah satu ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal dan keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi daerah adalah tingkat kinerja perpajakan di tingkat daerah. (Christia & Ispriyarso, 2019).

2. Inflasi

Kenaikan harga yang meluas dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dikenal sebagai inflasi (Amalia et al., 2022). Daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi keduanya terpengaruh secara negatif oleh inflasi yang tinggi. Dalam konteks pajak daerah, inflasi dapat mempengaruhi basis pajak baik secara langsung (melalui kenaikan harga barang dan jasa kena pajak) maupun tidak langsung (melalui pengaruh terhadap konsumsi dan investasi). Penelitian oleh Sangkaen et al. (2018) menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil cenderung menurunkan realisasi penerimaan pajak karena penurunan transaksi ekonomi formal.

Namun, dalam jangka panjang, inflasi yang terkendali dapat meningkatkan nilai nominal dari objek pajak, sehingga berpotensi menaikkan penerimaan pajak daerah (Azizah et al., 2024).

3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Mereka yang pengeluaran bulannya di bawah garis kemiskinan dianggap miskin menurut Badan Pusat Statistik. Karena kapasitas kontribusi pajak mereka yang sangat rendah, orang miskin memiliki pengaruh terhadap realisasi pajak daerah.

Sarjono et al. (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan tingkat kemiskinan akan menurunkan penerimaan pajak karena berkurangnya basis pajak produktif. Sebaliknya, strategi pajak yang progresif dan redistributif dapat digunakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Dalam beberapa studi empiris, hubungan antara kemiskinan dan realisasi pajak menunjukkan dinamika yang kompleks tergantung pada struktur ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan (Pasaribu et al., 2023).

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan faktor demografis yang sangat berperan dalam penentuan potensi pajak daerah. Meningkatnya jumlah penduduk dapat memperluas basis pajak apabila diiringi dengan peningkatan aktivitas ekonomi (Shafira, 2024). Penduduk yang produktif akan menciptakan permintaan

terhadap barang dan jasa, meningkatkan transaksi ekonomi, dan pada akhirnya memperbesar penerimaan pajak daerah

Namun, seperti dicatat oleh Arafat & Rindayati (2018), peningkatan jumlah penduduk tanpa disertai peningkatan pendapatan per kapita atau pemerataan ekonomi justru dapat memperburuk kondisi sosial dan mengurangi efektivitas pemungutan pajak.

1. Teori Permintaan Efektif Keynes

Menurut teori Keynesian, penerimaan negara termasuk pajak dipengaruhi oleh permintaan agregat, yang terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Ketika inflasi tinggi dan tingkat kemiskinan meningkat, konsumsi rumah tangga cenderung menurun, sehingga berdampak pada penurunan transaksi yang menjadi basis penerimaan pajak.

2. Teori Kapasitas Fiskal

Teori ini menyatakan bahwa kapasitas fiskal suatu daerah ditentukan oleh potensi ekonomi lokal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelolanya (Lisna et al., 2013). Faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pendapatan masyarakat, dan struktur ekonomi menjadi elemen penting dalam menentukan potensi pajak.

3. Teori Redistribusi Fiskal

Menurut teori ini, pajak memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat penerimaan negara tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan perpajakan yang adil dan progresif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas fiskal (Amalia et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi (X1), Tingkat Kemiskinan (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) terhadap Realisasi Pajak Daerah (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data time series selama kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2024.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah dan dokumen pemerintah daerah terkait. Data ini mencakup informasi tahunan mengenai:

Tabel 1. Daftar Variabel & Operasional

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam	Rupiah (Rp)

		mendukung efektivitas pelaksanaan otonomi daerah secara maksimal.	
2.	Inflasi (X1)	Fenomena ekonomi yang berlangsung mencerminkan peningkatan keseluruhan dalam jumlah uang yang beredar, yang disertai dengan kenaikan berkelanjutan harga barang dan jasa.	Persen (%)
3.	Tingkat kemiskinan (X2)	Tolok ukur utama yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah.	Persen (%)
4.	Jumlah penduduk (X3)	Tolok ukur fundamental dalam menilai perubahan dan perkembangan populasi suatu wilayah.	Jiwa (orang)

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Beberapa tahap analisis yang dilakukan antara lain:

1. Uji Asumsi Klasik:

- Uji Normalitas “untuk menguji apakah data residual terdistribusi normal.
- Uji Multikolinearitas untuk memastikan tidak ada hubungan yang kuat antar variabel independen (dilihat dari nilai VIF dan Tolerance).
- Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians dari residual.
- Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson dan Run Test.

2. Analisis Regresi Linier Berganda:

Digunakan untuk mengetahui hubungan simultan maupun parsial antara variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y). Persamaan model regresi yang digunakan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Uji Signifikansi Statistik:

- Uji t (Parsial) untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- Uji F (Simultan) untuk mengukur pengaruh ketiga variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Penelitian

Penjelasan mengenai analisis data yang diolah menggunakan SPSS ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh variabel yang diambil sebagai faktor independen terhadap Realisasi Pajak Daerah (Y) sebagai faktor dependen di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2. Data Penelitian

THN	Y	X ₁	X ₂	X ₃
2015	1.019.290.000.000	4,74	5,94	2.495.035
2016	941.490.000.000	2,11	5,66	2.550.192
2017	1.091.750.000.000	3,18	5,37	2.605.274
2018	1.354.700.000.000	4,52	5,17	2.660.209
2019	1.438.980.000.000	2,45	4,98	2.714.859
2020	1.243.220.000.000	1,03	4,82	2.662.456
2021	1.415.410.000.000	3,32	5,16	2.700.076
2022	2.095.650.000.000	6,32	5,28	2.737.189
2023	2.248.570.000.000	2,64	5,11	2.773.747
2024	2.371.130.000.000	1,03	5,17	2.809.700

Sumber : Data BPS 2025

Tabel ini menyajikan data penelitian yang menunjukkan perkembangan Realisasi Pajak Daerah (Y) di Kalimantan Tengah dari tahun 2015 hingga 2024. Dalam analisis ini, beberapa variabel ekonomi digunakan sebagai faktor independen, yaitu Inflasi (X1), Tingkat Kemiskinan (X2), dan Jumlah Penduduk (X3).

Tabel 3. Hasil deskripsi statistik

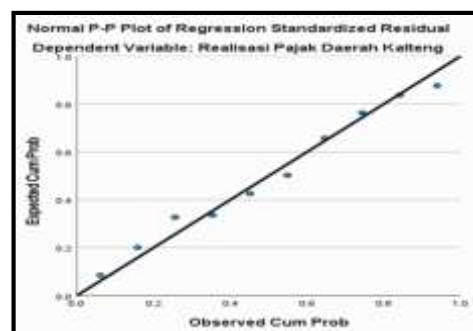
Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Realisasi Pajak Daerah Kalteng	1522019000000.00	524593560587.623	10
Inflasi	3.1340	1.67669	10
Tingkat Kemiskinan	5.2660	.32579	10
Jumlah Penduduk	2670873.70	98326.041	10

Sumber : Hasil Data SPSS

Merujuk pada Tabel 3, nilai Standard Deviation untuk variabel Y tercatat sebesar 524.593.560.587,623. Adapun rata-rata atau mean untuk variabel X1 adalah 1,67669, sementara variabel X2 memiliki nilai mean sebesar 0,32579, dan variabel X3 menunjukkan nilai mean sebesar 98.326,041.”

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1, Plot ini menampilkan titik-titik data yang dibandingkan dengan garis diagonal sebagai representasi distribusi normal yang diharapkan. Ketika titik-titik tersebut berada sejajar atau mendekati garis diagonal, maka residual dapat dikategorikan memiliki distribusi normal, yang menjadi aspek krusial dalam validasi regresi linier.

2. Uji Multi Kolinieritas

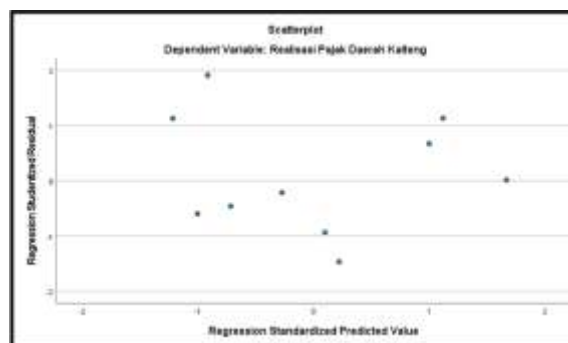
Tabel 4. Hasil Uji Multi Kolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Inflasi	.820	1.219
	Tingkat Kemiskinan	.394	2.541
	Jumlah Penduduk	.449	2.225

a. Dependent Variable: Realisasi Pajak Daerah Kalteng

Berdasarkan Analisis multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk setiap variabel independen selalu lebih tinggi dari 0,10, sedangkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) masing-masing berada di bawah batas 10. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi yang berlebihan antar variabel independen, sehingga model tidak terganggu oleh masalah varians.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul ketika variansi atau standar deviasi dari nilai variabel dependen tidak konsisten di setiap tingkat variabel independen. Untuk mendeteksinya, grafik scatterplot dapat digunakan dengan mencari pola tertentu. Terlihat dari grafik bahwa titik-titik data berjarak sama di atas dan di bawah nol pada sumbu Y, dan terdistribusi secara acak tanpa pola yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi perbedaan variabilitas error.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.938	2.787

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat Kemiskinan

b. Dependent Variable: Realisasi Pajak Daerah Kalteng

Hasil pengukuran, nilai Durbin Watson sebesar 2,787 terletak di atas batas atas (dU) yakni 2,016 namun masih berada di bawah nilai (4 – dU), yaitu 1,984, dengan dL tercatat 0,525. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin Watson, kondisi tersebut memberikan sinyal yang tidak cukup jelas untuk menyatakan adanya gejala auto korelasi. Maka disarankan untuk melanjutkan pengujian dengan metode Run Test guna mengidentifikasi pola residual secara lebih rinci.

Tabel 6. Hasil Uji Auto Korelasi Runs Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-14239799 307.37793
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	5
Z	-.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Dalam metode ini, apabila nilai Asymp. Sig yang diperoleh melebihi 0,05, dapat diartikan bahwa data tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil uji Run Test.

Analisis Regresi Berganda

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Persamaan dalam analisis regresi “ini menyajikan hubungan matematis antara variabel yang diteliti, sehingga memberikan dasar perhitungan untuk interpretasi hasil secara akurat dan sesuai dengan kondisi data.

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Uji Sig. T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-21395 801045129.215	32687613 15806.389		-6.546	.001
	Inflasi	12628228245.6 50	35067004 133.569	.040	.360	.731
	Tingkat Kemiskinan	851093535535. 806	26056282 5373.021	.529	3.266	.017
	Jumlah Penduduk	6887777.816	807988.50 4	1.291	8.525	.001

a. Dependent Variable: Realisasi Pajak Daerah Kalteng

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh model persamaan yang menggambarkan hubungan antar variabel. Persamaan ini memudahkan analisis pengaruh dan pola interaksi tiap variabel dalam penelitian, yaitu:

$$Y = -21395801045129.215 + 12628228245.650X_1 + 851093535535.806X_2 + 6887777.816X_3 + e$$

1. Uji signifikansi T (Parsial)

Hasil pada uji t Tabel 7. menunjukan variabel dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap Y jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan t hitung melebihi t tabel (2,447). Dari data yang tersedia, variabel Inflasi (X1) dengan t = 0,360 dan Sig. = 0,731 tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sementara variabel Tingkat Kemiskinan (X2) dengan t = 3,266 dan Sig. = 0,017 serta variabel Jumlah Penduduk (X3) dengan t = 8,525 dan Sig. = 0,001 terbukti berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Pajak Daerah Kalteng.”

$$Y = -21395801045129.215 + 851093535535.806X_2 + 6887777.816X_3$$

Berdasarkan analisis, nol hipotesis (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti bahwa Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kalimantan Tengah. Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Tingkat Kemiskinan berkorelasi dengan peningkatan Realisasi Pajak Daerah, yang berbeda dari teori yang “Menyatakan bahwa kenaikan Realisasi Pajak Daerah seharusnya menurunkan Tingkat Kemiskinan (ceteris paribus)”. Sebaliknya, pengaruh variabel Jumlah Penduduk sesuai dengan teori yang ada, di mana peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh peningkatan Realisasi Pajak Daerah.

2. Uji Signifikansi F (Simultan)

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Sig. F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232362069470564790000000.000	3	77454023156854930000000.000	30.341	.001 ^b
	Residual	15316493958435235000000.000	6	2552748993072539000000.000		
	Total	2476785634290000000000.000	9			

a. Dependent Variable: Realisasi Pajak Daerah Kalteng

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan uji-F, pengaruh simultan dari variabel independen-Inflasi, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk—terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kalimantan Tengah telah diuji. Nilai F-statistik sebesar 4,347, yang melebihi F-tabel (atau dengan nilai sign. < 0,05), menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, berdasarkan data pada Tabel 7, khususnya variabel Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk terbukti berpengaruh signifikan, sehingga fluktuasi Realisasi Pajak Daerah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.969 ^a	.938	.907	1597732453 53.299	2.787

a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Inflasi, Tingkat Kemiskinan

b. Dependent Variable: Realisasi Pajak Daerah Kalteng

Nilai R^2 sebesar 0,938 menunjukkan bahwa 93,8% variabilitas dalam Realisasi Pajak Daerah Kalteng dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk, sementara 6,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini time series dalam kurun waktu 10 tahun (2015 - 2024), dengan berdasarkan analisis, model regresi linier berganda yang menggunakan variabel Inflasi, Tingkat Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk secara kolektif memberikan pengaruh signifikan terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kalimantan Tengah. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak memberikan dampak signifikan ($t = 0,360$; Sig. = 0,731), sedangkan variabel Tingkat Kemiskinan ($t = 3,266$; Sig. = 0,017) dan Jumlah Penduduk ($t = 8,525$; Sig. = 0,001) berpengaruh positif secara signifikan. Perlu dicatat, pengaruh Tingkat Kemiskinan ternyata menunjukkan tren yang berbeda dari teori yang umumnya menyatakan bahwa peningkatan Realisasi Pajak Daerah seharusnya menurunkan tingkat kemiskinan (*ceteris paribus*), sedangkan pengaruh Jumlah Penduduk konsisten dengan teori, yakni peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh peningkatan pendapatan pajak. Selanjutnya, uji-F dengan nilai statistik sebesar 4,347 (nilai yang melebihi F-tabel atau dengan Sig. < 0,05) menguatkan bahwa variabel-variabel tersebut bersama-sama mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah. Dengan nilai R^2 sebesar 0,938, model ini mampu menjelaskan 93,8% variabilitas Realisasi Pajak Daerah, sementara sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model.

Artinya, Meskipun pertumbuhan populasi dapat memperbesar basis pajak, apabila distribusi pendapatan tidak merata, peningkatan penerimaan pajak bisa terjadi bersamaan dengan kenaikan tingkat kemiskinan. Jika dana bantuan pemerintah tersebut tidak disalurkan tepat sasaran ke program pengentasan kemiskinan, maka kenaikan realisasi pajak tidak sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam mengelola anggaran daerah:

1. Reformasi Kebijakan Perpajakan agar penyesuaian pada sistem perpajakan agar menjadi lebih progresif. Dengan demikian, beban pajak tidak terlalu memberatkan kelompok berpendapatan rendah, sehingga peningkatan penerimaan pajak dapat berkontribusi pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
2. Implementasi Kebijakan Redistributif yang Terpadu agar mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk merumuskan serta melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Integrasi kebijakan redistributif akan memastikan bahwa setiap kenaikan dalam realisasi pajak dapat teralokasi untuk program-program yang berdampak langsung pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.
3. Optimalkan Penyaluran Dana melalui Teknologi Informasi agar perkembangan sistem data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real-time. Dengan basis data yang akurat, penyaluran dana bantuan dapat dilakukan dengan cara yang lebih tepat sasaran, memastikan bahwa bantuan langsung diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.

REFERENSI

- Azizah, S. N., Jamaludin, M., & Nariyah, K. (2024). *Analisis Pengaruh PDRB riil dan Inflasi terhadap Pengangguran di Kota Serang*. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 115–123.
- Bululung, W., Prang, J. D., & Mongi, C. E. (2021). *Analisis Regresi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado Sulawesi Utara*. *d'Cartesian*, 10(2), 40–46.
- Pasaribu, F. F. M., Raysharie, P. I., Takari, D., & Hukom, A. (2023). *Kajian Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Seruyan*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(2), 243–256.
- Pratiwi, L. W. (2021). *Pengaruh PDRB, Belanja Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015–2019* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Shafira, M. A. R. (2024). *Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014–2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang*. *Rubinstein*, 1(2), 52–62.
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah, D. (2018). *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(12), 113-127.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). *Dampak kapasitas fiskal terhadap penurunan kemiskinan: Suatu analisis simulasi kebijakan*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1.

- Ananda, C. F. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., & Engka, D. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19(2).
- Saputra, A. A. (2018). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Cilegon*.
- Syahputra, R. (2017). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(2), 183-191.
- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., ... & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi pembangunan*. Penerbit Widina.
- Bululung, W., Prang, J. D., & Mongi, C. E. (2021). *Analisis Regresi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado Sulawesi Utara*. d\'Cartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi, 10(2), 40-46.